

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahan desentralisasi, di mana kekuasaan dan kewenangan didelegasikan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah otonom, termasuk tingkat desa. Desentralisasi hingga tingkat desa di Indonesia merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi dan pemberdayaan masyarakat lokal, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bahwa salah satu dari Nawa Cita Presiden Jokowi Widodo-Jusuf Kala adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sebagai upaya memperkuat daerah-daerah dan desa di seluruh Indonesia maka dikucurkan program dana desa dengan alokasi anggaran triliunan rupiah. Menurut filosofinya, tujuan desa adalah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat desa dan menjadikan desa tersebut kuat, mandiri, demokratis, dan buatan manusia. Dengan demikian, dimungkinkan untuk menciptakan landasan yang sesuai untuk proyek-proyek pemerintah dan proyek bangunan yang bermanfaat bagi kelas menengah dan masyarakat miskin. menyatakan jumlah penduduk desa. Sebaliknya, dalam wacana santun, data desa dikomunikasikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing kepala desa dengan tujuan untuk meningkatkan otonomi desa dan tenaga kerja dalam mengelola sumber daya desa. Penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ayat (19), menyatakan bahwa dana desa digunakan untuk mendukung pengelolaan pemerintahan desa, proyek konstruksi, pertukaran kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Walaupun demikian, dana desa lebih diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, disebutkan pula dalam pasal 20 bahwa penggunaan dana desa harus mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa). Lebih jauh, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Penggunaan Prioritas Dana Desa dijelaskan bahwa tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program atau kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) melainkan

memberikan pandangan prioritas dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program atau kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisis kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. Tata cara pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dimulai dari persiapan, musyawarah dusun, musyawarah perencanaan desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa dan sosialisasi. Pada kegiatan persiapan melakukan sosialisasi dan pembentukan kelompok kerja atau tim perencanaan desa yang dilanjutkan dengan penguatan kapasitas kelompok kerja atau tim perencanaan desa, penyusunan *Road Map*, identifikasi kebutuhan data sekunder desa, dan sosialisasi jadwal ke masing-masing dusun (Nain, 2017:102).

Dana Desa merupakan salah satu keuntungan desa terbesar yang diperoleh dari APBN. Dana ini dilaporkan ke rekening desa melalui rekening daerah dan digunakan untuk mendukung reformasi pemerintah, proyek konstruksi, pelatihan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang berguna dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan menggunakan bisa tanggung jawab pelaporan Dana Desa. Seluruh pagu dana desa tahun 2021 sebesar Rp72 triliun yang dialokasikan untuk 74.961 desa, sedangkan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun sebesar 74.939 desa. Dana Desa dibagi menjadi dua kategori: Mandiri dan Reguler. Kategorinya ditentukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

Ketika dana desa dialokasikan kepada kepala desa, maka akan timbul insentif bagi kepala desa untuk mengorganisasi masyarakat dalam kelompok-kelompok desa yang kegiatannya didanai oleh dana desa sebagai sarana pelestarian warisan budaya masyarakat. Artinya interaksi dapat dipandang sebagai suatu proses sosial. Sebagai proses interaksi sosial, hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kohesi sosial masyarakat secara umum. Interaksi masyarakat dapat terjadi dalam beberapa forum, seperti Forum Persiapan, Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dan Sosialisasi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Desa. Faktor-faktor yang dapat membentuk kohesifitas adalah

setiap anggota memiliki komitmen yang tinggi, interaksi didominasi kerjasama bukan persaingan, mempunyai tujuan yang terkait satu dengan lainnya (Faturochman, 2006:95).

Proses kekuasaan tentunya harus menjadi langkah awal menuju revitalisasi perekonomian. Bagaimanapun sebuah asosiasi bangunan, desa harus bertumpu pada sumber daya manusia desa sebagai lembaga pelaksana pembangunan untuk memberikan tata kelola yang utuh secara mutlak dalam pengaturan dan pengelolaan mandiri. Pemberian wewenang kepada desa merupakan metode dan jalan yang cocok untuk mencapai kecepatan pembangunan pedesaan. Meski begitu, hal tersebut juga harus diimbangi dengan sumber daya lain, seperti kapasitas dan pola pikir pemerintah daerah serta kemampuan masyarakat untuk menyikapi secara konstruktif dan mengambil tindakan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Pada tahap proses ini, keberadaan desa perlu diakui sebagai bagian dari strategi awal pemerintah dengan menjadikan desa memberikan kesempatan untuk mengelola keuangannya secara mandiri melalui proses Alokasi dan Alokasi Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menyediakan ruang yang lebih besar. Proyek ADD merupakan terobosan dalam mengkoordinasikan tata kelola desa dan mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat desa. Anggaran dana desa yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui anggaran dana desa pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 294 ayat 3

“Dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan Undang-undang mengenai Desa”.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal Desa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 21

tahun 2015, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dapat dikatakan bahwa tujuan penggunaan dana desa adalah APBDesa itu sendiri. Pembangunan desa yang paling berhasil adalah yang sesuai dengan Undang-Undang Desa yang menyeimbangkan pembangunan desa baik fisik maupun nonfisik. Selain itu, proses konstruksi tidak memberikan dampak negatif terhadap hasil kajian tata letak primer dan dasar; selain itu tidak berdampak negatif terhadap hasil kajian tata letak sekunder dan nondasar; sehingga tidak menghambat dan mengurangi proses pembangunan tata letak primer dan dasar (UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 74). Pendapatan total setiap desa bisa mencapai lebih dari Rp 1 juta dalam satu tahun. Secara umum, kabupaten-kabupaten di Indonesia menerima pendapatan yang sangat tinggi dari jumlah dan desa mereka. Distribusi pendapatan antar desa didasarkan pada negara bagian dan keadaan spesifik masing-masing desa. Sejumlah besar data desa harus digunakan dan dianalisis (Soemitro, 1990:10).

1.2 Rumusan Masalah

Dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Desa juga sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Berlaku UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, otonomi desa semakin luas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan lingkungan dan mempercepat pembangunan desa dalam rangka mempercepat kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat

membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Tujuan dana desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa berbagai upaya pembangunan dan pemberdayaan. Dana desa diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

Dengan pemanfaatan dana desa, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang merata dan berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa terpadu. Untuk mewujudkan pembangunan desa secara terpadu tentunya ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proyek konstruksi yang didanai oleh Dana Desa. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan hidup masyarakat setempat serta menghambat proses pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya udara harian secara berkelanjutan di wilayah sekitarnya (Peraturan Bidang Desa, 2019:55). Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa adalah upaya peningkatan desa (Peraturan Bidang Desa, 2019:239).

Prinsip dasar Undang-undang desa adalah menghubungkan fungsi *Local Self Government* dan *Self Governing Community*. Peran komunitas yang berpemerintahan sendiri adalah memulai upaya pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan isu-isu lokal yang spesifik pada daerah tersebut. Sebaliknya, pemerintahan mandiri lokal mengacu pada kewenangan yang dilaksanakan oleh negara bagian, provinsi, atau unit pemerintah daerah (Kota/Kupaten). Oleh karena itu, pemerintah desa harus memperhatikan setiap arahan dari pemerintah pusat yang telah dibuat untuk menggunakan sumber daya desa sebagai stimulus yang adil dan masuk akal untuk pembangunan. Beberapa organisasi lain, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan masyarakat desa, akan membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas utama membangun desa.

Pembangunan desa dilakukan secara partisipatif untuk meminimalkan dampak terhadap

penduduk lokal dan peran. Pembangunan desa mengakomodasi dengan kemandirian desa, karena pembangunan desa harus dikembangkan sebagai desa dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Peraturan Bidang Desa, 2019:266). Penggunaan dana desa harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan desa yaitu peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan penanggulangan kemiskinan (Peraturan Bidang Desa, 2019:266-267).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat Desa Klapanunggal terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan masyarakat Desa Klapanunggal penting agar penggunaan dan pengelolannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengenai dengan kepentingan riil dari masyarakat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan ringkasan masalah di atas, peneliti kemudian akan mengajukan pertanyaan penelitian kritis untuk menyempurnakan proyek penelitian. Meningkatkan pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam pembangunan terpadu?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan (fisik)?
3. Apakah capaian penggunaan dana desa dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Akademik

Maksud dari tujuan penelitian adalah untuk mengetahui arah yang tepat untuk diikuti oleh peneliti guna mengidentifikasi permasalahan apa saja yang mungkin

timbul selama proses penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan kesejahteraan sosial di Desa Klapanunggal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa secara terpadu dalam penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial di Desa Klapanunggal.
3. Untuk mengetahui capaian penggunaan Dana Desa Klapanunggal dalam aspek kesejahteraan sosial.

1.4.2 Tujuan Praktis

Penelitian ini bertujuan memenuhi salah satu prasyarat dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S. Sos) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.

1.5 Signifikan Penelitian

1.5.1 Signifikan Akademik.

Fokus penelitian ini adalah efektivitas pemanfaatan dana desa dalam memfasilitasi pembangunan terpal. Dengan demikian, dapat memberikan kontribusi terhadap kebutuhan literatur ilmu politik khususnya untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan sosial.

1.5.2 Signifikan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber intelektual bagi aparat desa yang telah berhasil menggunakan anggaran dan desa untuk mendukung proyek pembangunan desa dengan cara yang meminimalkan kerusakan sosial.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh masyarakat umum bagi pihak-pihak yang ingin memahami analisis keberhasilan penggunaan dana desa dalam membantu proyek-proyek konstruksi yang sulit.

1.6 Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung dan memperkuat penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pilar dan penopang penelitian ini. Kenali perbedaan dan persamaan dalam penelitian itu penulis lakukan sangatlah penting, berkat teori dan metode penelitian empiris. Berikut adalah hasil penelitian pendahuluan yang akan digunakan oleh penulis:

1. Suharyanto & Arif Sofianto, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah, 2012, yang berjudul “*Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif Di Jawa Tengah*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desk study dan teori yang digunakan adalah kepala desa dan konsep desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model konstruksi inovatif merupakan serangkaian konstruksi
2. yang dimulai dengan identifikasi potensi sumber daya dan diakhiri dengan penentuan jalur konstruksi yang menghubungkan setiap desa. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa tidaklah kinerja unsur-unsur internal desa semata, melainkan kerja bersama berbagai pihak. Dalam penelitian penulis ini menemukan kabahruan untuk diteliti adalah menggunakan teori pembangunan desa terpadu, dengan judul peneliti analisis pengelolaan dana desa di desa klapanunggal dalam mewujudkan pembangunan desa secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan sosial.
3. Kristina Eti dan Septina Dwi Rahmawati, Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2019, yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa*”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis *purposive sampling* dan teori partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dana desa telah mnegikuti atuaran petunjuk yang diaturan perundang-undangan. Sedangkan proses dari pelaporan dan pertanggungjawaban masih mengalami keterlambatan. Dalam penelitian ini penulis menemukan kebaharuan untuk diteliti adalah menggunakan teori pembangunan desa terpasdu, teori kesejahteraan, dengan judul peneliti analisis pengelolaan dana desa di desa klapanunggal dalam mewujudkan pembangunan desa secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

4. Agus Hendrayady, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2017 yang berjudul “*Strategi Pembangunan Desa Terpadu Suatu Pilihan Paradigma People Centered Development*”. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori yang digunakan adalah partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat sekarang adalah masyarakat yang selalu ingin berpartisipasi dalam pembangunan apalagi dengan slogan dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga pola yang paling tepat adalah apa yang diinginkan oleh masyarakat, yang diusulkan oleh masyarakat sehingga mereka tidak hanya sekedar menunggu saja apa yang ingin dan akan dibuat oleh pemerintah. Dalam penelitian penulis ini menemukan kabahruan untuk diteliti adalah menggunakan teori pembangunan desa terpadu, teori kesejahteraan, dengan judul peneliti analisis pengelolaan dana desa di desa klanunggal dalam mewujudkan pembangunan desa secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

Hasil analisis penelitian singkat yang ada di bawah ini dan Terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat dibandingkan untuk memahami persamaan dan perbedaan kedua penelitian yang dimaksud. Perbandingan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian *Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif Di Jawa Tengah 2012*. Terdapat perbedaan sekaligus persamaan dengan analisis penulis. Perbedaan nama, lokasi, teori, dan waktu penelitian. Di sisi lain, kesamaannya hanya sebatas pembahasan pembangunan padu desa. Dalam penelitian penulis ini menemukan kabahruan untuk diteliti adalah menggunakan teori pembangunan desa terpadu, teori kesejahteraan dengan judul penelitian analisis pengelolaan dana desa di desa klanunggal dalam mewujudkan pembangunan desa secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan sosial
2. Dalam penelitian “*Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa*”. Perbedaannya terjadi pada judul, lokasi, teori, dan waktu penelitian. Di sisi lain, orang yang sama menganalisis investasi dana desa. Dalam penelitian penulis ini menemukan kabahruan untuk diteliti adalah menggunakan teori pembangunan desa terpadu, teori kesejahteraan dengan judul penelitian analisis

3. pengelolaan dana desa di desa klapanunggal dalam mewujudkan pembangunan desa secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan sosial
4. Dalam penelitian *Strategi Pembangunan Desa Terpadu: Suatu Pilihan Paradigma People Centered Development*, 2017. Terdapat perbedaan sekaligus persamaan dengan analisis penulis. Terdapat perbedaan judul, lokasi, teori, dan waktu penelitian. Sebaliknya kesamaan adalah sama-sama membahas pembangunan desa terpadu. Dalam penelitian penulis ini menemukan kabahruan untuk diteliti adalah menggunakan teori pembangunan desa terpadu, teori kesejahteraan dengan judul penelitian analisis pengelolaan dana desa di desa klapanunggal dalam mewujudkan pembangunan desa secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan sosial

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Teori Pembangunan Desa Terpadu

Desa terpadu yang dimaksudkan untuk meminimalkan pertumbuhan penduduk. Dalam program pembangunan, penetapan standar untuk membantu mereka tumbuh, mengembangkan sumber daya teknologi lokal, pelatihan, sumber daya keuangan, peraturan, dan jadwal kerja sekaligus melindungi informasi rahasia untuk membantu mereka tumbuh (Brugger, 1986:39). Menurut Shortall dan Shucksmith (1998:75) pembangunan bukan hanya tentang peningkatan barang dan jasa yang disediakan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Bangunan yang menitikberatkan pada pemanfaatan masyarakat sebagai aktor utama dan mempunyai kemampuan untuk terlibat, berdiskusi, dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan potensinya guna menjalin keterkaitan (interkoneksi) yang kuat antara alam, sosial ekonomi dan aspek budaya, dan zaman yang kita jalani. Untungnya, pembangunan pedesaan terpadu, atau pembangunan desa terpadu, merupakan pendekatan multi-sektoral yang mengutamakan partisipasi lokal dan perspektif luar.

Menurut Shortall dan Shucksmith (1998:75) pembangunan desa terpadu memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Holistik

Pembangunan desa terpadu mencakup berbagai aspek kehidupan

masyarakat, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Peneliti menjelaskan makna dari holistik yaitu *pertama*, dalam kehidupan masyarakat bahwa dengan melibatkan warga desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, sehingga masyarakat memiliki tanggungjawab atas kesuksesan desa mereka dan menciptakan rasa kepemilikan dan semangat gotong royong yang kuat. *Kedua*, ekonomi dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, serta memberikan bantuan modal, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan warga desa. *Ketiga*, pendidikan dapat meningkatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pendidikannya. *Keempat*, kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga masyarakat memiliki kesehatan yang lebih baik. *Kelima*, lingkungan dapat mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan mempertahankan kualitas lingkungan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang memadai bagi semua warga desa agar mereka dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Kesejahteraan mencakup semua tindakan dan proses secara langsung, diantaranya tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup (Sukoco, 2015).

b. Partisipatif

Melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Peneliti menjelaskan makna dari partisipasi yaitu *pertama*, dalam perencanaan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan program pembangunan yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sehingga meningkatkan kualitas dan efektivitas program pembangunan. *Kedua*, pelaksanaan, masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program karena mereka

meiliki rasa tanggungjawab atas hasil pembangunan yang dilakukan. *Ketiga*, evaluasi dapat meningkatkan efektivitas pembangunan dan memastikan program pembangunan yang dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. Soetomo (2017) menyatakan bahwa keadaan masyarakat umum adalah yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, kradilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas, bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi.

c. Berbasis Potensi Lokal

Menggunakan dan mengembangkan potensi sumber daya lokal yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peneliti menjelaskan maknanya masyarakat dapat memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan dan daya sumber yang tersedia di desa untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan potensi lokal, berarti desa tersebut menggunakan sumber daya yang tersedia di sana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mengelola sumber daya, meningkatkan pendapatan serta kualitas hidup. Pengelolaan dana desa untuk mengembangkan potensi lokal, Desa Klapanunggal dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakatnya. Pendekatan ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan bersifat inklusif dan berkelanjutan, serta mampu mengurangi kesenjangan sosial. Analisis pengelolaan dana desa yang fokus pada pengembangan potensi sumber daya lokal ini akan menunjukkan bagaimana desa dapat secara efektif menggunakan Daya sumber yang tersedia untuk mencapai keseimbangan sosial yang stabil dan berjangka panjang.

d. Berkelanjutan

Mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Peneliti menjelaskan maknanya bahwa langkah yang diambil harus memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang. Maka dari itu setiap

keputusan dan tindakan dalam pembangunan harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya dan berusaha menjaga keberlanjutan kesejahteraan secara masyarakat berkelanjutan serta sumber daya alam. Penyewaan desa dana yang efektif harus meminimalkan dampak negatif dari setiap proyek dan inisiatif yang melibatkan pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, setiap lapisan desa dapat mengakui manfaat pembangunan secara adil dan tidak memihak. Dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan, Desa Klapanunggal dapat mewujudkan kesejahteraan sosial yang sejati dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Pengembangan sumber daya manusia, pengembangan tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan kualitas hidup dan penentuan tindakan y secara langsung yang mencakup proses (Sukoco, 2015).

e. Konektivitas

Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas desa terhadap pusat-pusat ekonomi dan layanan publik. Peneliti menjelaskan maknanya bahwa desa masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar dengan lebih mudah. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk desa dan mengurangi ketegangan antara desa dan kota. Dalam jangka panjang peningkatan kobektivitas dan akseibilitas ini akan membantu mengurangi antara desa dan kota. Hal ini akan berkontribusi pada tujuan pembangunan desa yang terpadu dan menyeluruh, serta pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata. Oleh karena itu, analisis investasi desa di Desa Klapanunggal tidak hanya berfokus pada aspek finansial, namun juga bagaimana investasi tersebut dapat digunakan secara strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan konsekuensi desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan mempunyai dampak positif dan bermanfaat bagi setiap penduduk di desa.

Model pendekatan dan strategi serta konsep tentang program pembangunan, yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan di daerah pedesaan, salah satu diantaranya pendekatan pembangunan berorientasi kerakyatan, yang mencoba menempatkan manusia, sebagai makhluk yang

memiliki kreativitas (*Values Creating*) yang merencanakan, menentukan dan mengerjakan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan (potensi) yang mereka miliki, serta mereka pulalah yang memanfaatkan dan menilai keberhasilan pembangunan desa yang dilaksanakan. Namun hal ini akan memberikan kontribusi yang berharga bagi proyek konstruksi yang sedang berjalan (Agus Hendrayady, 2017:361). Konsep tentang pembangunan sosial terpadu memiliki dimensi pelayanan sosial (Dwi Astuti, 2021:197) diantaranya:

- a) Sosialisasi berkaitan dengan pembekalan kelemahan sosial.
- b) Pembangunan ekonomi, terkait dengan penyediaan platform perekonomian warga dan fasilitas pengupahan.
- c) Pengembangan politika, adalah cara memberikan pembelajaran dan modalitas kepada para partisipasi warga masyarakat untuk mengurangi kepentingan mereka.
- d) Kearifan lokal sebagaimana wadah dan ruang memberikan pengembangan dan pelaksanaan budaya, mengakui partisipasi dari setiap budaya yang berbeda.
- e) Pengembangan lingkungan, yaitu bagaimana masyarakat mempunyai
- f) kemampuan memanfaatkan lingkungan hidup sebagai sumber daya atau aset bagi pelaksanaan pengembangan masyarakat dan pengkajian kebutuhan.
- g) Pengembangan personal atau spiritual, berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup seseorang pada tataran personal dan spiritual.

1.7.2 Konsep Kesejahteraan Sosial

Secara umum, kesejahteraan mengacu pada terciptanya kondisi masyarakat yang lebih baik, kebutuhan akan pasokan bahan pangan yang lebih bergizi, perlunya bimbingan spiritual saat bekerja, munculnya keteraturan dan keteraturan sosial, penerapan hukum bagi seluruh warga negara, dan pengurangan utang negara (Dwi Astuti, 2021:195). Kesejahteraan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menganalisis dan menafsirkan kondisi sosial dan ekonomi yang muncul. Kondisi ini

juga diperlukan untuk meminimalisir permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu memerlukan kondisi yang stabil, baik dari segi material maupun non material, agar dapat berperan serta dalam masyarakat yang harmonis (Balthasar Watunglawar, 2020:16).

Keadilan sosial diartikan sebagai negara yang menjunjung tinggi segala bentuk kebutuhan manusia, khususnya yang bersifat fundamental seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan (Suharto, 2005). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, tujuan penegakan keadilan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan keberlangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencengah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan kempuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melembaga dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menurut Toton Witono (2020:61), ada tiga pendekatan utama yang sering digunakan dalam upaya memberikan keadilan sosial, yaitu:

1. Pendekatan Pembangunan Sosial

Keadilan sosial tidak dapat dipahami dari perspektif pembangunan sosial. Pendekatan konstruksi sosial ini mempunyai kaitan erat dengan tercapainya kohesi sosial dalam suatu masyarakat (Frica Esther, 2019:186). Pembangunan sosial dipandang sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan keadilan sosial dan memberikan solusi efektif terhadap permasalahan sosial yang ada. Pendekatan ini sangat berbeda dengan ketiga pendekatan lainnya dalam hal memajukan kondisi kesejahteraan sosial.

Menurut Toton Witono (2020:61), terdapat tiga pendekatan keadilan sosial yang berbeda dengan pembangunan sosial yang diterima, yaitu:

a. Filantropi sosial dan pemberian filantropis, sering dikenal sebagai filantropia. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu membina kohesi sosial dengan menyediakan beberapa layanan dan sumber daya swasta kepada mereka yang membutuhkan.
- 2) Kepercayaan agama didasari motivasi amal kegiatan amal yang bersifat pribadi.
- 3) Setelah itu, lewat organisasi menyediakan ruang yang diperlukan bagi mereka yang memerlukannya.
- 4) Mirip dengan *Charity Organization Society* (COS), yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi upaya kerja lapangan dan mengembangkan teknik kerja lapangan baru. Munculnya pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi bermula dari upaya organisasi tersebut di atas.

b. Intervensi pekerjaan profesional dan sosial dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Penekatan terorganisir untuk mengangkat kesejahteraan sosial, menggunakan kualitas profesional yang berguna untuk menghadapi masalah sosial.
- 2) Fokus praktik pekerjaan sosial adalah pada intervensi yang bijaksana untuk mengatasi masalah sosial secara efektif.
- 3) Pekerjaan sosial tradisional dan konseling terapeutik untuk mengatasi masalah sosial individu dan kelompok.

c. Saat ini pekerjaan sosial telah berhasil membedakan antara kasus remedial dan non-remedial. Sebagai contoh layanan remedial, memberikan konseling dan alternatif bentuk remediasi. Kesejahteraan sosial dan administrasi sosial (kadang-kadang dikenal sebagai layanan kesejahteraan dan administrasi sosial):

Universitas Kristen Indonesia

- 1) Meningkatkan kohesi sosial dengan membuat program-program sosial di dalam pemerintahan dengan menggunakan berbagai bentuk bantuan sosial.
- 2) Terkait dengan kebijakan sosial dan pelayanan sosial.
- 3) Pendekatan ini menyederhanakan sistem sumber ke kelompok perang yang lebih luas dan inklusif di seluruh negara (semua kelompok perang menerima layanan tanpa kecuali).
- 4) Kalimat ini didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi hak-hak rakyat negaranya.

Pendekatan kesesejahteraan sosial yang menawarkan respons efektif dalam masalah sosial yang ada. (Toton Witono, 2020:63). Linton ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Proses pembangunan sosial erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi.
- b. Perkembangan ilmu sosial mempunyai fokus interdisipliner yang menggunakan teori-teori dari beberapa ilmu sosial.
- c. Konsep pembangunan sosial lebih erat kaitannya dengan proses karena merupakan konsep dinamis dengan gagasan tentang pertumbuhan dan perubahan yang sangat spesifik.
- d. Membangun sosial harus mengacu pada ide-ide perbaikan dan peningkatan sosial, karena perubahan bersifat progresif.
- e. Proses pembangunan sosial intervensionis, yang mengacu pada setiap tindakan proaktif yang diambil untuk mengatasi perubahan kesejahteraan sosial.
- f. Tujuan pembangunan sosial dicapai melalui berbagai strategi yang secara bertahap atau cepat menghubungkan intervensi sosial dengan upaya pembangunan ekonomi.

2. Pendekatan Derma Sosial

Pendekatan ini lebih berkaitan dengan pemberian, kesukarelaan, dan peran

pertubuhan daripada pemerintah dalam menyediakan barang-barang yang diperlukan dan manfaat kesejahteraan sosial (Frica Ester, 2019:186). Sikap membantu sesama manusia ini selalu wujud dan diamalkan melalui derma sosial. Sebagai salah satu pendekatan tradisional (membunuh kitab suci dan ajaran agama), sosialisasi melibatkan pengakuan hakikat manusia, amal jariah, dan asimilasi ajaran agama (Frica Ester, 2019:186–187). Dalam konteks pembangunan desa, konsep pemberian dan kesukarelaan dapat diterapkan melalui inisiatif-inisiatif yang mendukung masyarakat dalam pembangunan desa. Kampanye ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat umum dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung penyediaan barang dan layanan sosial yang dibutuhkan daerah. Nilai dan ajaran agama dapat menciptakan sikap tolong menolong dan derma sosial.

3. Pendekatan Kerja Sosial

Pekerjaan sosial adalah bidang akademis, ilmiah, dan profesional yang menggunakan pengetahuan terkini untuk membantu orang dalam menyelesaikan masalah pribadi, kelompok, dan komunitas guna mencapai keadilan sosial. Pendekatan ini menggunakan pengetahuan, teknik, dan penguatan ikatan antarmanusia untuk membantu bisnis dalam memenuhi kebutuhan umat manusia (Frica Ester, 2019:187). Pekerjaan di sektor sosial merupakan upaya berkelanjutan untuk mempromosikan pekerjaan sosial yang profesional dan beretika yang menangani masalah-masalah sosial. Pekerjaan sosial memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia dengan mengedepankan martabat dan aspirasi manusia (Frica Ester, 2019:187). Pengelolaan dana desa untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien, dalam berbagai keterampilan dalam hubungan, penilaian, komunikasi, observasi, dan intervensi.

1.7.3 Desa

Berikut beberapa pendapat para ahli terkait definisi desa dalam berbagai macam aspek adalah:

1. Desa Dalam Aspek Antropologi

Desa adalah sebuah komunitas agraris yang hidup berdasarkan sistem persawahan dan memiliki ikatan sosial yang kuat melalui tradisi dan norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun (Geertz, 1963:45). Peneliti menjelaskan maknanya dalam aspek antropologi bahwa desa merupakan komunitas yang berfokus pada pertanian, khususnya sistem persawahan, dan memiliki ikatan sosial yang erat yang terbentuk melalui tradisi dan norma-norma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keberadaan tradisi dan norma-norma ini memberikan dasar yang kuat bagi kehidupan sosial dan ekonomi desa, serta menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara warga desa. Sedangkan di Desa Klapanunggal sebagai komunitas agraris dengan ikatan sosial yang kuat, pengelolaan dana desa dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi lokal. Hal ini akan membantu dalam mewujudkan pembangunan desa yang terpadu dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga desa.

2. Desa Dalam Aspek Sosiologi

Desa adalah suatu jenis desa, atau komunitas, yang terdiri dari orang-orang yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu, yang pada umumnya ramah dan kooperatif dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagian besar berada di luar ruangan (Suhartono, 2000:11). Peneliti menjelaskan dari temuan penelitian psikologi bahwa desa adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam lingkungan yang sehat. Dengan pola hidup, budaya, dan pekerjaan mereka, corak kehidupan di desa tidak homogen. Penduduk desa sangat mengakar pada tanah yang merupakan sumber penghidupan utama mereka.

Dalam pengelolaan dana kabupaten akan dipastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan tepat waktu serta meningkatkan tingkat kohesi sosial secara umum di kalangan warga Desa Klapanunggal.

3. Desa Dalam Aspek Ekonomi

Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi (Suhartono, 2000:12). Desa biasanya terdiri dari rumah

tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama. Peneliti menjelaskan maknanya dalam aspek ekonomi bahwa desa merupakan tempat di mana orang hidup dalam ikatan keluarga dalam kelompok perumahan yang memiliki ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi. Kehidupan perekonomian desa biasanya didominasi oleh rumah tangga petani yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan investasi. Tekanan ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat, mendorong struktur sosial yang kuat dan kerja sama dalam masyarakat lokal. Dalam hal ini, penting untuk dipahami bahwa desa adalah tempat di mana masyarakat hidup dalam komunitas yang erat satu sama lain dan di mana terdapat ikatan sosial dan ekonomi yang signifikan yang memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menggunakan sumber daya desa untuk mendukung upaya berkelanjutan dan kerja keras. perkembangan. Saya pastikan pembangunannya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat struktur sosial Desa Klapanunggal, sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih tinggi.

4. Desa Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014

Desa dengan nama lain, atau dengan desa dan desa adat. Lebih spesifiknya, Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada masyarakat hukum yang mempunyai kemampuan mengaktualisasikan diri dan menentang arahan pemerintah. Hal ini juga merujuk pada pentingnya komunitas lokal berdasarkan praktik komunitas, adat istiadat, dan/atau hukum yang diakui dan dijunjung tinggi oleh pemerintah Republik Indonesia (Peraturan Dalam Bidang Desa, 2019:2). Berdasarkan temuan penelitian, Desa mempunyai kemampuan untuk membentuk dan menegakkan kebijakan pemerintah serta kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, ushul dan hal-hal adat yang diakui dan dihormati oleh pemerintah. Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengelolaan desa di Desa Klapanunggal harus menghormati adat istiadat dan tradisi yang dianut masyarakat setempat. Artinya, proyek dan program harus mematuhi adat dan kepercayaan masyarakat di mana proyek dan program tersebut dilaksanakan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat umum

dalam eksplorasi dan implementasinya. Dengan demikian, masyarakat memahami bahwa desa adalah sekelompok kecil masyarakat hukum yang berkeinginan untuk memenuhi tuntutan pemerintah dan masyarakat setempat agar dapat memberikan pedoman yang jelas bagi pengembangan desa di Desa Klapanunggal. Menghormati hak asal usul dan tradisi, melibatkan pengelolaan.

1.7.4 Dana Desa

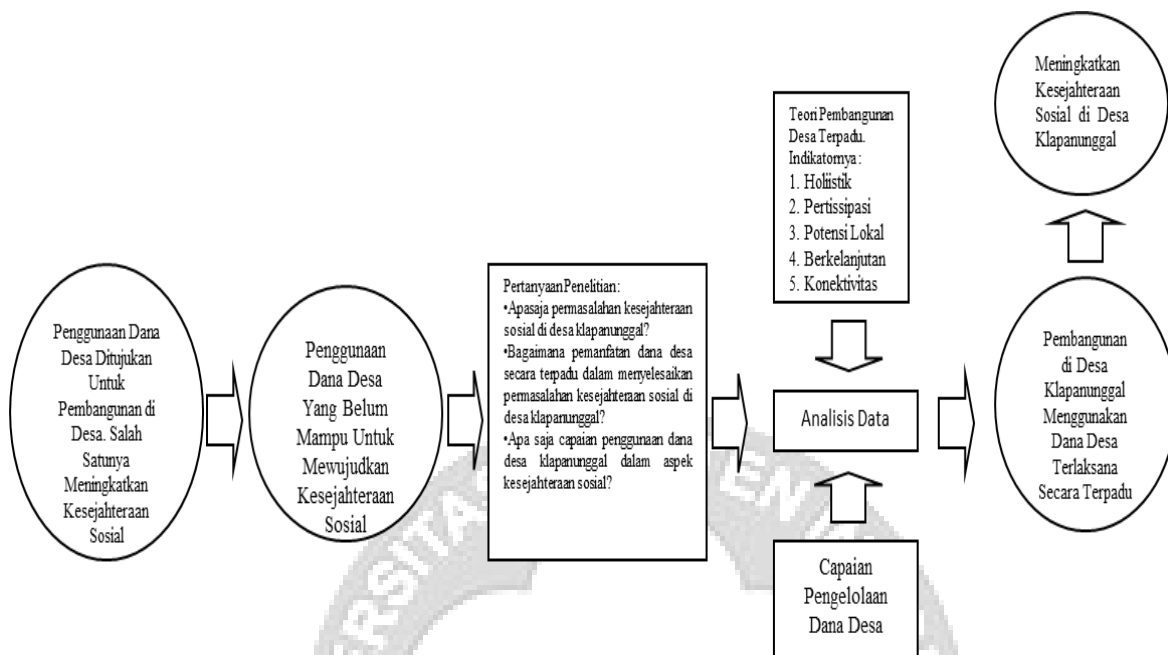
Berikut definisi dana desa dari beberapa Undang-undang adalah:

1. Dalam UUD Desa No 6 Tahun 2014, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama studi ini adalah untuk mendukung pembangunan desa, termasuk infrastruktur seperti jalan, sekolah, sistem irigasi, dan layanan kesehatan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui pembangunan infrastruktur, penjangkauan masyarakat, dan pengembangan desa yang efisien dan partisipatif. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk desa dan menekan pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peneliti menjelaskan maknanya bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
4. Saku Dana Desa terbitan Menteri Keuangan edisi tahun 2017 dana desa adalah anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam

5. rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Dana desa yang berasal dari APBN ini memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan yang komprehensif dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dengan adanya dana desa, Desa Klapanunggal memiliki sumber daya finansial yang signifikan untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial warganya. Peneliti menjelaskan bahwa Pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa secara terpadu. Analisis pengelolaan dana desa di Desa Klapanunggal akan membantu dalam memahami bagaimana dana ini digunakan, sejauh mana dampaknya terhadap pembangunan desa, dan bagaimana dana tersebut dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Pembangunan desa yang terpadu melibatkan berbagai aspek, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dengan pengelolaan dana desa yang baik, Desa Klapanunggal dapat mengembangkan program-program yang tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan layanan kesehatan.

1.8 Alur Pemikiran

Alur pemikiran adalah dasar pemikiran yang memanfaatkan metoden yang nantinya dijadikan sebagai standar dalam melakukan penulisan peneliti, antaratar belakang, masalah, teori, serta. Para peneliti ingin menilai efektivitas penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan desa dengan cara yang meminimalkan keresahan sosial. Metodologi penelitian ini berfokus pada bagaimana menerapkan teori pada permasalahan penelitian.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Alur Pemikiran

Tujuan utama penggunaan dana desa untuk pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kohesi sosial. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakmampuan desa untuk mengatasi permasalahan sosial secara efektif. Untuk menjawab pertanyaan penelitian permasalahan kesejahteraan sosial dan pemanfaatan dana desa secara terpadu, maka harus menggunakan teori pembangunan desa secara terpadu dari beberapa indikator yaitu holistik, partisipasi, potensi lokal, berkelanjutan, dan konektivitas. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan apa saja capaian penggunaan dana desa harus menggunakan capaian pengelolaan dana desa. Setelah pertanyaan penelitian dijawab langsung dianalisis untuk menemukan hasil penelitian bahwa penggunaan dana desa di Desa Klapanunggal terlaksana secara efektif dan efisien. Serta adanya manfaat dari capaian untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa Klapanunggal.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini dikenal dengan metode analisis kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang

berfokus pada mengidentifikasi dan memahami perbedaan antara beberapa individu atau kelompok orang yang mempunyai masalah sosial. Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari gaya hidup masyarakat secara umum, kesenjangan pengetahuan, praktik budaya, konsep atau fenomena, hubungan interpersonal, dan topik lainnya. Manfaat utama menggunakan pendekatan kualitatif adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami komponen individu dari suatu fenomena yang seringkali sulit untuk dipahami (Creswell, 2016:46). Penulis ingin mengetahui, menemukan, dan mendeskripsikan kebebasan penelitian kualitatif. Pola penggunaan dana desa secara terpadu dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami makna atau pemahaman yang mendasari suatu studi kasus, fakta, teori, kejadian, atau permasalahan tertentu yang dihadapi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mendidik atau menunjukkan adanya hubungan apa pun yang diakibatkan oleh sebab atau akibat dari studi kasus atau isu tertentu (J.R. Raco, 2010:106).

1.9.2 Jenis Penelitian

Jenis analisa yang digunakan adalah eksploratif. Penelitian eksploratif diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang menyebabkan munculnya kesukaran tertentu. Karena penelitian eksplorasi terbatas pada pencarian ide atau hubungan baru, maka penelitian ini tidak memiliki metodologi penelitian formal. Pelaksanaannya bergantung pada kreativitas dan imajinasi tim peneliti, yang terdiri dari peneliti berkualifikasi tinggi. Tujuan penelitian eksploratif adalah mengembangkan generalisasi yang dihasilkan dari proses induktif yang berkaitan dengan kelompok, aktivitas, proses, atau situasi yang dipelajari (Given, 2008:327).

Dalam studi eksploratif ini, peneliti perlu memiliki posisi spesifik dari sudut pandang berbasis data dan mencakup seluruh wilayah studi. Jenis penelitian ini didasarkan pada pendirian yang telah ditentukan yang diperoleh dari verifikasi dan konfirmasi. Sangat perseptual bagi penyelidik. Dengan demikian, subyektifitas seringkali menghambat peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Hal ini disebabkan adanya beragam desain atau preposisi yang mungkin dapat dijadikan

fokus utama untuk menjelaskan fenomena tertentu karena dasar preposisi hanya dapat tercipta melalui penelitian yang dilakukan saat ini (Given, 2008: 327).

Umumnya penelitian eksploratif merupakan langkah awal untuk penelitian selanjutnya yang lebih sistematis. Mempelajari eksplorasi jaguar membuahkan hasil yang menarik; Meski demikian, penelitian ini lebih fokus pada analisis apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan fenomena sosial yang terjadi saat ini (lebih spesifiknya menjawab pertanyaan “Apa atau Bagaimana?”). Penelitian eksplorasi memerlukan kreativitas serta keinginan dengan rencana penelitian yang bisa terus berubah mengingat belum ada panduan dalam menemukan data atau informasi yang penting. Oleh karena itu, penelitian eksplorasi seringkali menggunakan teknik kualitatif dalam pengumpulan data serta tidak dicakup pada teori dan pertanyaan penelitian yang disusun sejak awal. Dengan adanya pertanyaan “apa”, peneliti dapat memperoleh pemahaman dan wawasan terhadap suatu tugas tertentu secara lugas. Informasi yang ditemukan dalam penelitian eksplorasi jenis ini sangat panjang, fleksibel, dan non-struktural (Bambang Mudjiyanto, 2018:68).

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell, metode pengumpulan data untuk penelitian kualitatif meliputi observasi, kuesioner, telekonferensi dokumen, dan materi audio dan visual (Creswell, 2016:53).

1. Data Primer

a) Teknik Wawancara Semistruktur

Menurut Denzin dan Lincoln Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana pewawancara dan responden terlibat dalam percakapan terstruktur atau tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Peneliti menentukan narasumbernya adalah, Kepala Desa, Kaur Perencanaan, Kasie Pemerintah, Kasie Kesejahteraan, Staf Kesejahteraan, Kaur Keuangan, Dusun dan Masyarakat. Adapun alasan peneliti memilih nara sumber tersebut karena mereka yang paling mengetahui. Tujuan dari pertanyaan penelitian ini adalah untuk memperoleh data pemanfaatan desa dan penggunaannya, serta data pemanfaatan dan manfaatnya. Sumber data lainnya mencakup persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan

desa, data pemanfaatan desa oleh pemerintah, pengumpulan data, analisis data, dan pengumpulan data untuk keperluan evaluasi pemanfaatan desa.

b) Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel, dan media. Pengumpulan data oleh peneliti juga dilakukan melalui studi dokumentasi, misalnya ringkasan data adalah kebijakan dana desa, implementasi, pengalokasian pembangunan dana desa secara terpadu. Sumber datanya adalah rincian ABPDes, Dokumen APBDes, RPP DDes dari UUD Desa, Rincian Dana Desa, dari RKPDes APBdes. Adapun teori yang digunakan peneliti adalah Menurut Shortall dan Shucksmith (1998:75) pembangunan bukan hanya tentang peningkatan barang dan jasa yang disediakan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Konstruksi yang menitikberatkan pada pemanfaatan masyarakat umum sebagai pelaku utama, dengan kemampuan memberikan tekanan, pengaruh, dan melaksanakan konstruksi sesuai dengan sumber daya dan potensi yang tersedia, guna terjalinnya keterkaitan *interkoneksi* yang kuat antar alam, aspek sosial-ekonomi, dan aspek budaya seperti yang kita lihat saat ini dan di masa yang akan datang.

1.9.4 Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling. pengambilan sampel sembarangan disebut juga *non-probability sampling*, adalah suatu teknik pemilihan sampel dimana tidak setiap anggota populasi mempunyai kemauan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Ini berbeda dengan purposive sampling yang memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Jenis *Non-Purposive Sampling* yang diambil peneliti adalah *Convenience Sampling* (Sampel Kemudahan). *Convenience sampling* adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada kemudahan, di mana subjek yang dijadikan sampel adalah mereka yang mudah dijangkau oleh peneliti (Sugiyono, 2010:24).

Tabel 1.1 Instrumen Penelitian

Teori	Dimensi	Indikator	Item
Pembangunan Desa Terpadu	Holistik	Ekonomi	1. Apa saja profesi mayoritas masyarakat desa klanunggal yang menjadi sasaran

			<p>utama pembangunan menggunakan dana desa?</p> <p>2. Apakah penggunaan dana desa telah sesuai dengan karakteristik profesi masyarakat desa klanunggal?</p> <p>3. Apa saja sektor utama yang menjadi penggerak perekonomian di desa klanunggal?</p> <p>4. Bagaimana kualitas infrastruktur desa klanunggal, seperti jalan, listrik, dan air bersih dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat?</p> <p>5. Apa saja potensi ekonomi lokal yang belum optimal dimanfaatkan desa klanunggal? dan bagaimana strategi untuk mengembangkannya?</p> <p>6. Apa saja potensi ekonomi lokal yang sudah optimal dimanfaatkan desa klanunggal?</p> <p>7. Apa saja bentuk kerjasama antara desa klanunggal dengan desa-desa tetangga dalam upaya pengembangan?</p> <p>8. potensi ekonomi lokal?</p> <p>9. Apakah masyarakat desa klanunggal sudah dinyatakan</p>
--	--	--	---

			<p>sejahtera dalam penggunaan dana desa?</p> <p>10. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat desa klapanunggal ini sudah memenuhi kebutuhan sehari-harinya</p>
	Partisipasi	Peran Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa terpadu? 2. Bagaimana peran masyarakat dapat berkontribusi dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan desa? 3. Bagaimana peran perempuan dan anak muda dalam pembangunan desa terpadu? 4. Bagaimana cara pemerintah desa mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa? 5. Apa saja keberhasilan dana desa yang melibatkan peran aktif masyarakat? 6. Bagaimana masyarakat dapat berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien?

			<p>7. Apa dampak positif dari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa?</p> <p>8. Apa saja mekanisme yang dapat digunakan masyarakat untuk memastikan transparansi penggunaan dana desa?</p> <p>9. Apakah masyarakat sudah dinyatakan sejahtera dengan penggunaan dana desa?</p> <p>10. Apakah penggunaan dana desa sudah sesuai dengan harapan masyarakat?</p>
	Potensi Lokal	Ekonomi Lokal	<p>1. Apa saja upaya yang dilakukan untuk memperkuat jaringan pemasaran produk lokal dengan bantuan dana desa?</p> <p>2. Seberapa besar peran dana desa dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti kelompok usaha?</p> <p>3. Apa peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi lokal masyarakat desa klanunggal?</p> <p>4. Apakah masyarakat desa klanunggal sudah sejahtera dalam penggunaan dana desa untuk meningkatkan ekonomi lokal masyarakat?</p> <p>5. Seperti apa strategi pemerintah desa</p>

			<p>untuk meningkatkan ekonomi lokal masyarakat desa?</p> <p>6. Apa saja program ekonomi lokal yang sudah didanai oleh pemerintah desa dari dana desa?</p> <p>7. Bagaimana kelanjutan program ekonomi yang di danai dana desa dipastikan agar terus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat?</p> <p>8. Apa saja strategi yang efektif untuk mengembangkan ekonomi lokal di desa klapanunggal?</p> <p>9. Bagaimana mengukur keberhasilan dan inisiatif pengembangan ekonomi lokal? Bagaimana pengembangan ekonomi lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal?</p>
	Berkelanjutan	Proyek Berkelanjutan	<p>1. Apa saja proyek atau program pembangunan yang telah dibiayai dengan dana desa?</p> <p>2. Bagaimana proyek pembangunan desa mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa?</p> <p>3. Apa saja strategi yang efektif untuk meningkatkan</p>

			<p>inklusi keuangan desa klapanunggal?</p> <p>4. Bagaimana kebijakan daerah untuk mendukung proyek pembangunan desa yang berkelanjutan?</p> <p>5. Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi dapat ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan proyek pembangunan desa klapanunggal?</p> <p>6. Apakah proyek pembangunan desa itu keuangannya dari anggaran dana desa?</p> <p>7. Apakah penggunaan dana desa sudah menunjukkan kesejahteraan sosial dalam pembangunan desa secara berkelanjutan?</p> <p>8. Apa yang harus dilakukan pemerintah desa ketika pembangunan desa secara berkelanjutan tidak terlaksana atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat?</p> <p>10. Bagaimana memastikan partisipasi aktif masyarakat desa dalam proyek berkelanjutan?</p>
	Konektivitas	Konektivitas Sosial	<p>1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan</p>

			<p>evaluasi penggunaan dana desa?</p> <p>2. Bagaimana penggunaan dana desa mempengaruhi interaksi sosial dan kohesi komunitas di desa klanunggal?</p> <p>3. Bagaimana dampak penggunaan dana desa terhadap hubungan antara pemerintah dan masyarakat desa klanunggal?</p> <p>4. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan desa?</p> <p>5. Apa tujuan musyawaran desa dalam meningkatkan interaksi sosial melalui pemanfaatan sumber daya desa?</p> <p>6. Bagaimana pengaruh penggunaan dana daerah terhadap pertumbuhan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat? Apa hubungan antara penggunaan dana desa dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan?</p> <p>7. Bagaimana efektivitas program-program yang didanai dari dana desa dalam meningkatkan konektivitas sosial di desa klanunggal?</p> <p>8. Bagaimana model konektivitas sosial yang diterapkan di desa-desa lain dapat diadaptasi</p>
--	--	--	--

			<p>dan diterapkan di desa tertentu?</p> <p>9. Apa praktik terbaik dalam penggunaan dana desa untuk membangun konektivitas sosial yang kuat di komunitas perdesaan?</p>
Teori Kesejahteraan Sosial			<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja permasalahan kesejahteraan sosial di desa klapanunggal ini? 2. Bagaimana cara pemerintah menyelesaikan permasalahan yang ada di desa klapanunggal ini? 3. Apa faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan sosial di masyarakat desa klapanunggal? 4. Bagaimana peran masyarakat dalam memperbaiki kondisi kesejahteraan sosial? 5. Apakah masyarakat desa klapanunggal sudah sejahtera dalam berbagai aspek? 6. Bagaimana dampak program BLT-DD terhadap peningkatan kesejahteraan sosial? 7. Apa peran pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan sosial untuk memastikan kesejahteraan sosial

			<p>masyarakat desa klanunggal?</p> <p>8. Apa capaian yang sudah dilakukan oleh pemerinathan desa klanunggal ini?</p> <p>9. Apa saja permasalahan yang kesejahteraan sosial yang ada di desa klanunggal?</p> <p>10. Apa haran pemerintah untuk masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa klanunggal?</p>
--	--	--	---

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2024

1.9.5 Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan objek penelitian telah diperoleh, maka data-data tersebut diolah lebih lanjut dengan memilih informasi yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Data diklasifikasikan menurut indikator yang berasal dari teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif melibatkan interpretasi konseptual terhadap seluruh data yang tersedia dengan menggunakan strategi analisis yang dimaksudkan untuk mengubah data mentah menjadi deskripsi dan penjelasan tentang suatu fenomena yang sedang dipelajari dan diteliti (Altinay & Paraskevas, 2008:167).

Menurut Miles dan Huberman (Sudiyono, 1992:50), analisis dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Informasi Reduksi. Katakan dengan lantang apa yang penting, fokus pada apa yang penting, jelajahi subjeknya, dan pastikan desainnya akurat. Data yang ramah peneliti akan memberikan ilustrasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Dalam reduksi data, proses pengumpulan data erat kaitannya

- b. dengan pengumpulan data, karena data yang tidak lengkap akan ditarik kembali untuk memudahkan penelitian. Ada beberapa langkah dalam proses redaksi data yang diikuti peneliti, yaitu dimulai dengan pengumpulan data awal. Melalui proses ini, peneliti mengumpulkan data penting dan relevan dari temuan penelitian dengan menggunakan kelompok fokus dan analisis dokumen yang selaras dengan topik penelitian. Oleh karena itu, dalam proses wawancara seringkali peneliti memberikan data yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Proses ini akan membuat data menjadi lebih spesifik dan detail. Selain itu, fakta akurat.
- c. Tampilan Informasi. Kajian yang dilakukan merupakan kumpulan informasi yang tidak dipublikasikan sehingga memungkinkan dilakukannya penelitian mengenai kesimpulan dan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan grafik batang tunggal, beberapa kolom, tabulasi silang, diagram alur, dan format lainnya. Pada bagian ini, penulis menggunakan kata-kata atau kalkulator untuk melakukan analisis data secara kualitatif. Augmentasi data didasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil review data. Visualisasi data analitis membantu peneliti memahami apa yang terjadi. Peneliti bekerja keras untuk mengumpulkan data yang relevan sehingga informasi yang mereka kumpulkan dapat dianalisis dan mungkin membantu memecahkan masalah penelitian.
- d. Kesimpulan awal yang dikemukakan akan berubah bila kotak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung. Kesimpulan awal masih bersifat sementara. Tampilan data yang dikaburkan oleh data dapat diartikan sebagai sumber informasi yang kredibel. Pada titik ini peneliti mencari makna dan arti, keteraturan, pola-pola, dan alur sebagai akibat dari hasil kajian yang telah selesai dievaluasi, agar dapat membuahkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Penelitian observasi, kerangka teori, sistematika penulisan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta.

BAB II. Gambaran objek penelitian

Penelitian ini menjelaskan tentang geografi, jumlah penduduk, agama, adat istiadat, dan perekonomian Desa Klapanunggal. Data dalam kumpulan ini merupakan perangkat pendukung untuk analisis bab-bab lebih lanjut. Hal ini karena data menunjukkan seberapa baik upaya pembangunan dana desa dalam memitigasi kerusuhan sosial.

BAB III. Pengelolaan dana desa di desa klapanunggal

Pada bab ini menjelaskan masalah kesejahteraan sosial, pengelolaan dana desa, dan analisa pengelolaan dana desa.

BAB IV. Implikasi pembangunan terpadu desa klapanunggal

Pada bab ini menjelaskan pendekatan pembangunan sosial, pendekatan derma sosial dan pendekatan kerja sosial.

BAB V. Kesimpulan

Bagian ini merupakan hasil dari proses analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya tentang analisis pengelolaan dana desa di desa klapanunggal dalam mewujudkan pembangunan desa secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan sosial, serta saran kepada peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

Bagian ini berisi informasi tentang referensi yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data untuk penelitiannya.

Lampiran